



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

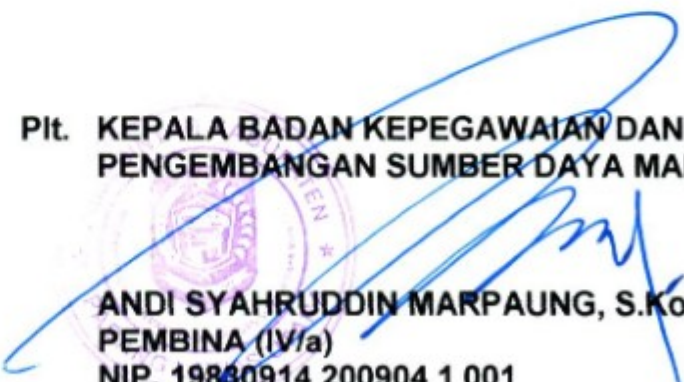
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini sebagai implementasi dari program dan kegiatan yang telah diusulkan dan sedang berjalan sehingga mempunyai kredibilitas nilai yang bersifat terstrukturisasi melalui kerangka acuan aparatur umum tentang pembangunan daerah kedepan.

Selain itu adanya review dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan dapat menjelaskan skala prioritas secara konkrit dari setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat memacu gerak dan langkah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Demikian dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat.

**Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



**ANDI SYAHRUDDIN MARPAUNG, S.Kom, MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19830914 200904 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)	
SAMPAI DENGAN TAHUN LALU.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM sampai Tahun Lalu.....	9
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah	19
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM	24
3.3. Program dan Kegiatan	27
BAB IV PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Sampai Tahun Lalu.....	11
TABEL 3.1 Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Nasional, Provinsi dan Kabupaten .	21
TABEL 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Tahun 2025	25
TABEL 3.3 Program dan Kegiatan Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Lawas Utara adalah penjabaran Rencana Kerja Kerja BKPSDM untuk periode 1 (satu) tahun dan penjabaran Rencana Kerja lima tahunan berupa Rencana Strategis (Renstra). Sehingga Perubahan Renja Tahun 2025 mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Tahun 2025 Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (PRKA) tahun 2025;
3. Perubahan Renja Tahun 2025 Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara dan dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis pembangunan bidang pemerintahan di Tahun 2025 yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Lawas Utara yakni melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran dalam melaksanakan kebijakan strategis tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun Perubahan Renja Tahun 2025. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Renstra 2024-2026. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam PKUA dan PPPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2005-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2013 Nomor 440), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
 10. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 Nomor 15);
 11. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 Nomor 51);

12. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025.
13. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 adalah sebagai panduan dalam penyusunan Renja yang merupakan acuan dalam melaksanakan program/ kegiatan/ sub kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

1. Terwujudnya penjabaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025;
2. Terwujudnya penjabaran Renstra Tahun 2024-2026 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan anggaran Tahun 2025;
4. Melakukan evaluasi terhadap Renja tahun lalu dan pada tahun berjalan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) BKPSDM SAMPAI DENGAN TAHUN LALU
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM sampai Tahun lalu
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) BKPSDM SAMPAI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Sampai Tahun Lalu

Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara selama tahun 2025 dan perkiraan target tahun 2026. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Lebih lanjut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan tahun 2024 dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan (2025) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana dalam tabel lampiran pada laporan ini.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Kinerja dan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara melalui sinkronisasi perencanaan dengan realisasi anggaran dan peningkatan capaian target kinerja serta evaluasi secara komprehensif dan berkelanjutan;
- b. Optimalisasi pelayanan administrasi kepegawaian dengan upaya penerapan pelayanan terpadu satu pintu dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Optimalisasi penyusunan formasi kebutuhan jabatan fungsional dan sertifikasi/diklat untuk jabatan struktural, fungsional dan pelaksana;
- d. Meningkatkan kualitas data kepegawaian serta integrasi sistem informasi manajemen kepegawaian daerah dengan pusat;
- e. Upaya peningkatan disiplin dan evaluasi kinerja melalui implementasi e-absen dan e-kinerja.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja BKPSDM sampai dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Sampai dengan Tahun Lalu

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaraan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.03	KEPEGAWAIAN									
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	B Predikat	B Predikat				B Predikat	B Predikat	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00%
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	10 Laporan	10 Laporan				10 Laporan	3 Laporan	33,33%

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaraan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	0,00%
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ Bulan	33 Orang/ Bulan				33 Orang/ Bulan	33 Orang/ Bulan	100,00%
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok.	12 Dok.				12 Dok.	2 Dok.	16,66%
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Kegiatan	7 Kegiatan				7 Kegiatan	7 Kegiatan	0,00%

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaraan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				1 Paket	- Paket	0,00%
5.03.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	40 Paket				12 Paket	4 Paket	11,42 %
5.03.01 2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	800 Paket	800 Paket				800 Paket	280 Paket	35,00%
5.03.01.2.0 6.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	9 Paket				9 Paket	2 Paket	20,00%
5.03.01.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dok.	19 Dok				14 Dok.	- Dok.	00,00%

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaraan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.7.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 <i>Laporan</i>	93 <i>Laporan</i>				115 <i>Laporan</i>	5 <i>Laporan</i>	4,16%
5.03.01.7.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 <i>Kegiatan</i>	4 <i>Kegiatan</i>				4 <i>Kegiatan</i>	4 <i>Kegiatan</i>	0,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 <i>Unit</i>	4 <i>Unit</i>				9 <i>Unit</i>	- <i>Unit</i>	0,00%
5.03.01.5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 <i>Paket</i>	19 <i>Paket</i>				37 <i>Unit</i>	6 <i>Unit</i>	12,00%
5.03.01.6.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	4 <i>Kegiatan</i>	4 <i>Kegiatan</i>				4 <i>Kegiatan</i>	4 <i>Kegiatan</i>	0,00%

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaraan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3 Pemerintahan Daerah	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.6.7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 <i>Laporan</i>	1000 <i>Laporan</i>				1000 <i>Laporan</i>	500 <i>Laporan</i>	166,00%
5.03.01.6.8	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 <i>Laporan</i>	12 <i>Laporan</i>				12 <i>Laporan</i>	3 <i>Laporan</i>	25,00%
5.03.01.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 <i>Laporan</i>	12 <i>Laporan</i>				16 <i>Laporan</i>	3 <i>Laporan</i>	18,75%
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	90 %	90 %				100 %	100 %	100,00%
5.03.02.2	Mutasi Dan Promosi ASN	Jumlah Kegiatan Mutasi Dan Promosi ASN Yang Terlaksana	3 <i>Kegiatan</i>	3 <i>kegiatan</i>				3 <i>Kegiatan</i>	3 <i>Kegiatan</i>	0,00%

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaraan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.2.7	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	110 Dok.	116 Dokumen				110 Dok.	- Dok.	00,00%
5.03.02.2.8	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	325 Laporan	580 Laporan				300 Dok.	- Dok.	0,00%
5.03.02.2.9	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200 Dok.	345 Dokumen				70 Dok.	- Dok.	0,00%
5.03.02.1	Pengadaan. Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan. Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN	6 Kegiatan	6 Kegiatan				6 Kegiatan	6 Kegiatan	
5.03.02.1.13	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	7 Laporan	7 Laporan				7 Laporan	2 Laporan	28,57%

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaraan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.1.1 4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	24 Dok.	24 Dokumen				24 Dok.	2 Dok.	8,33%
5.03.02.3	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Yang Terlaksana	6 Kegiatan	6 Kegiatan				6 Kegiatan	6 Kegiatan	0,00%
5.03.02.3.1 1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	100 Orang				200 Orang	- Orang	0,00%
5.03.02.3.1 2	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	5 Dok.	270 Dok.				270 Orang	- Orang	0,00%
5.03.02.3.1 3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	2 Orang				7 Orang	2 Orang	40,00%
5.03.02.4	Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Kegiatan	2 Kegiatan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	0,00%

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaraan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	42 Dok.	42 Dok.				42 Dok.	- Dok.	0,00%
5.03.02.4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	20 Orang	0 Orang				10 Orang	- Orang	0,00%
5.03.02.4.3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 Laporan	4 Laporan				5 Laporan	- Laporan	0,00%

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dan Daerah

Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain:

- **Manajemen Aparatur Sipil Negara.** Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 2 jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selanjutnya, turunan undang-undang tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- **Sistem Rekrutmen CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),** Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pasal 99 mensyaratkan seluruh aparatur pemerintah yang berstatus non ASN akan dihapuskan atau dialihkan menjadi PPPK paling lambat per Desember 2024. Tentu kebijakan ini menimbulkan banyak nya polemik dan kontra khususnya dari pemerintah daerah yang sebagian besar sumber daya aparaturnya masih berstatus honorer, termasuk Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, ada sekitar 3.800-an ASN dan sekitar 3.200-an tenaga honorer yang terdata, kalau kebijakan ini diterapkan tentunya akan banyak ketimpangan dan kesenjangan terhadap kinerja perangkat daerah dan secara langsung juga akan berdampak pada perputaraan ekonomi dan menimbulkan pengangguran massal. Melihat dampak negative yang begitu besar, akhirnya Pemerintah Pusat menunda penerapan kebijakan tersebut sampai batas yang tidak ditentukan. Sebagai solusinya, Pemerintah Pusat memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan rekrutmen PPPK sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

□ **Sistem Merit dan NSPK Manajemen ASN serta Profesionalitas ASN**, Peraturan turunannya PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 mensyaratkan agar manajemen ASN dilaksanakan berbasis sistem merit dimana pengawasan dan pengendaliannya menjadi kewenangan KASN, sistem merit ini terbagi atas 8 (delapan) aspek dalam manajemen ASN. Selanjutnya Badan Kepegawaian Negara juga memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian NSPK Manajemen ASN sebagaimana diatur dalam PerBKN No. 12 Tahun 2022 serta adanya usaha peningkatan profesionalitas ASN melalui peningkatan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang juga menjadi kewenangan BKN sebagaimana diatur dalam PermenPANRB No. 38 Tahun 2018 dan PerBKN No. 8 Tahun 2019. Ketiga isu manajemen ASN di atas tentu menjadi prioritas juga dalam manajemen dan pengembangan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi BKPSDM, juga yang menjadikan isu ini penting adalah dilakukan evaluasi setiap tahunnya oleh instansi yang berwenang atas pelaksanaannya.

□ **Pengembangan Kompetensi serta Pendidikan dan pelatihan**, Ketentuan peraturan perundang-undangan mensyaratkan pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun bagi setiap ASN. Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku instansi yang berwenang dalam pengembangan Pendidikan dan Pelatihan ASN menetapkan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebagai berikut:

- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- Keputusan Kepala LAN Nomor: 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pengembangan kompetensi juga mengalami beberapa perubahan misalnya pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan, dengan terbitnya Surat Edaran MenPANRB Nomor 28 Tahun 2021 tertanggal 29 Desember 2021

memungkinkan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan ditempuh dengan metode online dan dibolehkan mengambil perkuliahan sabtu-minggu asalkan prodi yang diambil sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Begitunya juga penyelenggaraan Diklat, sudah memungkinkan dengan metode online. Tentunya perubahan-perubahan ini harus direspon dengan cepat dan tanggap.

- **Manajemen Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi**, seiring dengan kemajuan teknologi, pemerintah juga dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi tersebut sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, manajemen kepegawaian berbasis elektronik tidak bisa dihindari. Badan Kepegawaian Negara selaku pemangku kewenangan dalam pelaksanaan manajemen ASN juga telah banyak mengupayakan pemanfaatan teknologi dalam manajemen ASN, sebagai amanah dari UU No. 5 Tahun 2014 yang mensyaratkan manajemen ASN harus dilakukan secara online melalui SI-ASN. SI-ASN ini telah mencakup seluruh aspek dalam manajemen ASN, mulai dari layanan kenaikan pangkat secara online, layanan pengajuan pension secara online, penetapan hukuman disiplin secara online, manajemen kinerja secara online, dll. Untuk itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara juga harus responsif terhadap isu ini.

Tabel 3.1
Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Nasional, Provinsi dan Kabupaten

No	Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024	RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026		RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026	
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan	Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
			Meningkatnya derajatnya kesehatan		
			Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		
			Meningkatnya iklim demokrasi		
			Peningkatan ketangguhan bencana		
			Menurunnya angka kemiskinan		
2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

No	Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024	RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026		RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026	
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
			Meningkatnya Kesejahteraan Petani		
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata		
3	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera	Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kinerja Layanan Sistem Transportasi	Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur dasar
			Meningkatnya Layanan Infrastruktur Permukiman		
			Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan		
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
			Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah		
4	Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
6	Terpenuhinya layanan dasar			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
8	Terwujudnya pengentasan kemiskinan			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
9	Meningkatnya Produktivitas dan daya saing			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing

No	Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024	RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026		RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026	
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, innovative dan kreatif			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar			Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur dasar
17	Meningkatnya konektivitas wilayah			Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur dasar
18	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan				
19	Meningkatnya akses dan pasokan energy dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien				
20	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan eonomi			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
21	Peningkatan kualitas lingkungan hidup				Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
22	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim			Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
23	Pembangunan rendah karbon			Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
24	Meguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas dan Inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
			Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
			Meningkatnya pelayanan publik yang prima		
			Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur		
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Inovasi Daerah		

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 adalah “Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dibidang manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur”.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Rencana Pembangunan Daerah. Penetapan tujuan akan mengarahkan pada kemudahan dalam perumusan program dan kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan target yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan tersebut.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia serta membantu Bupati Padang Lawas Utara dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, kebijakan yang *up to date*, mampu menjawab tantangan dan isu-isu strategis yang berkembang dalam manajemen ASN.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan : “Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dibidang manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur”

Sasaran : 1. Peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian dan Pengembangan sumber daya manusia aparatur.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Tahun 2025

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA 2025	TARGET KINERJA 2026
	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dibidang manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur	Nilai Implementasi Sistem Merit	250 (III) / "Baik"	280 (III) / "Baik"
1	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai AKIP	71,52 (B)	76,52 (BB)
		Nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat	80 (Baik)	82 (Baik)
2	Peningkatan kualitas manajemen kepegawian dan Pengembangan sumber daya manusia aparatur	Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN	70 (C) / "Cukup"	75 (B) / "Baik"
		Nilai Indeks Profesionalitas ASN	76 "Sedang"	81 "Tinggi"

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 menetapkan program prioritas Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Digitalisasi Pelayanan Publik dan Penguatan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima yang mana salah satu arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Selanjutnya, sebagai pengungkit tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program prioritas daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara berupaya menjabarkannya kedalam Renstra Tahun 2024-2026. Kemudian direalisasikan ke dalam RKPD Perangkat Daerah. Adapun program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Kepegawaian Daerah.

Selanjutnya, sasaran strategik yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen terhadap implementasi atas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah;
2. Mengoptimalkan manajemen ASN berbasis sistem merit dan implementasi NSPK Manajemen ASN;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam manajemen ASN;
4. Mengoptimalkan pengembangan ASN berbasis analisis kebutuhan pengembangan kompetensi.

Dengan memperhatikan arah pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merumuskan Perubahan Renja Tahun 2025. Adapun rumusan perubahan rencana program dan kegiatan, indikator, penyebaran lokasi pelaksanaan kegiatan, target, indikatif anggaran dijelaskan dalam tabel 3.3 dibawah ini:

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP- OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur- ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							5.503.936.981,00	6.293.196.401,00	5.601.509.053,00	97.572.872,00							6.291.546.102,00	
	8	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							5.503.936.981,00	6.293.196.401,00	5.601.509.053,00	97.572.872,00							6.291.546.102,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							5.503.936.981,00	6.293.196.401,00	5.601.509.053,00	97.572.872,00							6.291.546.102,00	
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	4.436.201.081,00	4.396.987.901,00	3.856.129.753,00	-145.902.779,00							4.290.298.302,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	36.141.500,00	36.842.800,00	33.023.300,00	-3.118.200,00				Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BKPSDM		31.302.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	36.141.500,00	36.842.800,00	33.023.300,00	-3.118.200,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			31.302.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi/ Keuangan Perangkat Daerah				120 Dokumen	120 Dokumen	3.319.189.181,00	3.257.145.401,00	2.987.446.353,00	-331.722.828,00				Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BKPSDM		3.185.094.201,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/b	33 Orang/b	3.158.129.181,00	3.097.305.401,00	2.980.446.353,00	-197.882.828,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			3.024.054.201,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				120 Dokumen	120 Dokumen	181.040.000,00	158.840.000,00	27.000.000,00	-134.040.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			181.040.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	381.907.100,00	366.666.400,00	196.378.800,00	-183.530.300,00				Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BKPSDM		382.023.201,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.724.600,00	3.724.600,00	3.724.600,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			3.724.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurangnya (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	98.656.400,00	98.656.400,00	100.441.400,00	1.785.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			98.656.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				600 Paket	3 Paket	18.920.000,00	19.180.500,00	17.316.000,00	-1.604.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			18.920.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	45.413.100,00	45.432.300,00	32.820.400,00	-12.592.700,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			45.413.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				14 Dokumen	0 Dokumen	21.058.000,00	21.058.000,00	0,00	-21.058.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			21.058.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				115 Laporan	80 Laporan	194.135.000,00	178.614.600,00	44.074.400,00	-150.060.600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			194.251.101,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Laporan	12 Laporan	514.533.300,00	514.533.300,00	514.533.300,00	0,00				Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BKPSDM		514.533.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	1000 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM- POK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur- ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	290.418.000,00	290.418.000,00	290.418.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			290.418.000,00	SADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				16 Laporan	16 Laporan	214.115.300,00	214.115.300,00	214.115.300,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			214.115.300,00	SADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik	undefined				-	undefined	184.450.000,00	221.800.000,00	122.750.000,00	-81.700.000,00				Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BKPSDM		177.345.000,00	SADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	53.900.000,00	121.250.000,00	55.400.000,00	-28.500.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			75.790.000,00	SADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	25 Unit	100.550.000,00	100.550.000,00	67.350.000,00	-33.200.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			100.555.000,00	SADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Terpenuhinya Penataan ASN dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Persentase Jumlah ASN yang memahami Penilaian Kinerja berbasis E-Kinerja				-	95 60 Porsen persen	1.067.735.900,00	1.896.208.800,00	1.745.379.300,00	893.511.900,00							1.961.247.800,00		
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pembekalan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				-	4744 lapors	210.478.000,00	481.480.300,00	407.285.500,00	196.787.500,00			-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BKPSDM		516.869.300,00	SADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				10 Dokumen	6 Dokumen	29.999.800,00	29.999.800,00	12.560.000,00	-17.439.800,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	SADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM- POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur- ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																				
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				2 Laporan	2 Laporan	29.997.800,00	301.000.100,00	216.126.900,00	186.129.100,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			340.419.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0008 Fasilitas Lembaga Profesi ASN																				
			Jumlah Lembaga Profesi/ ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	34.030.600,00	34.030.600,00	52.378.900,00	18.348.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				24 Dokumen	24 Dokumen	116.450.000,00	116.450.000,00	126.200.000,00	9.750.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			116.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan mutasi/ dan promosi ASN yang terlaksana				3 Kegiatan	43 Kegiatan	213.280.000,00	655.948.600,00	497.809.400,00	284.329.400,00			-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BKPSDM		704.173.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				40 Dokumen	40 Dokumen	53.280.000,00	53.280.000,00	21.964.000,00	-31.616.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			53.280.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																				
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				300 Dokumen	300 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	19.109.600,00	-60.890.400,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				70 Dokumen	300 Dokumen	80.000.000,00	522.668.600,00	456.835.600,00	378.835.600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			570.893.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang terlaksana				4 Kegiatan	4 Kegiatan	499.999.900,00	614.801.800,00	781.191.800,00	281.191.900,00			-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BKPSDM		596.204.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																				
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				3 Orang	7 Orang	274.000.000,00	304.000.000,00	440.000.000,00	166.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			274.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0008 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional																				
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				265 Orang	275 Orang	225.999.900,00	310.801.800,00	341.191.800,00	115.191.900,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			322.204.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur				42 Laporan	42 Laporan	143.978.000,00	143.978.000,00	59.312.800,00	-84.665.400,00			-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BKPSDM		144.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				42 Dokumen	42 Dokumen	89.978.800,00	89.978.800,00	45.552.800,00	-44.426.200,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																				
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				10 Orang	10 Orang	23.999.600,00	23.999.600,00	1.200.000,00	-22.799.600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			24.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																				
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				5 Laporan	5 Laporan	29.999.800,00	29.999.800,00	12.580.000,00	-17.439.800,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
J U M L A H									5.503.936.981,00	6.293.196.401,00	5.601.509.063,00	77.668.576.008,00								6.291.546.192,00

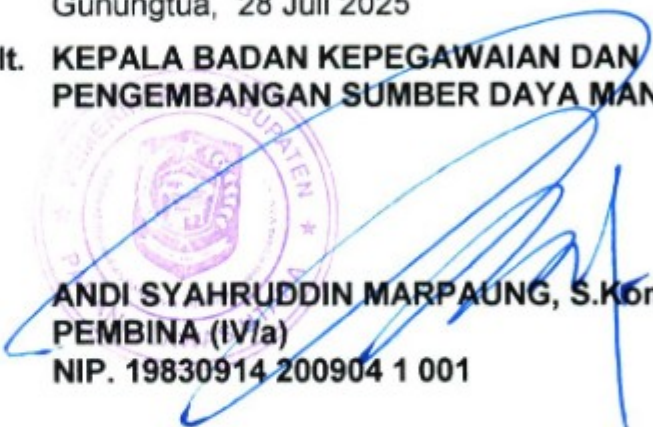
BAB IV

PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 disusun, dengan harapan agar seluruh elemen pelaksana di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara dapat menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas seta partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program – program yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini.

Gunungtua, 28 Juli 2025

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



ANDI SYAHRUDDIN MARPAUNG, S.Kom,M.M
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19830914 200904 1 001